

Press Release***“Evaluasi Kebijakan Pangan di Masa Pemerintah Jokowi-JK”***

Jakarta, 10 Juli 2016

Kantor INDEF

Pada awal Pemerintahannya tahun 2014, Pemerintahan Jokowi-JK menargetkan swasembada sejumlah komoditas pangan strategis, antara lain padi, jagung, kedelai, dan gula, dapat tercapai dalam waktu tiga tahun. Dalam mencapai target ambisius tersebut, Pemerintah telah meningkatkan anggaran secara sangat signifikan, namun demikian, besarnya anggaran untuk program swasembada pangan tersebut dirasa tidak sejalan dengan hasil yang didapatkan. Hingga saat ini, Indonesia masih menghadapi sejumlah permasalahan guna mewujudkan target kedaulatan pangan. Berikut catatan INDEF atas pencapaian target kedaulatan pangan:

1. Apakah Program Pajale on the Track?

- Salah satu program prioritas Nawacita adalah Kedaulatan Pangan. Tidak tanggung-tanggung, anggaran kedaulatan pangan melonjak hingga mencapai 53,2 persen dari Rp 67,3 triliun di 2014 mencapai 103,1 triliun di 2017 (Anggaran APBN program strategis kedaulatan pangan di Kementerian Pertanian, Kelautan dan Perikanan, PU dan PERA, Sosial, dan anggaran Non K/L terkait kedaulatan pangan).
- Anggaran tersebut utamanya guna peningkatan produksi dan produktivitas pangan (supply side), dialokasikan melalui empat komponen, yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian PU PERA, Subsidi Pupuk dan Subsidi Benih. Total belanja keempat komponen ini melonjak 61,7 persen dari Rp 40,2 triliun (2014) menjadi Rp 65 triliun (2017). Artinya empat komponen ini telah menyedot 59,5 persen dari total alokasi anggaran kedaulatan pangan.
- Namun demikian, tingginya alokasi anggaran tersebut ternyata belum optimal dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Dalam konteks Pajale misalnya, tren

peningkatan anggaran di ketiga komoditas pangan ini tidak secara merata dan optimal mengakselerasi produksi dan produktivitas.

2. Kamufase Stop Impor

- Impor beras masih cukup besar. Anggaran dan subsidi meningkat, tapi impor beras juga meningkat. Data PIB (Pemberitahuan Impor Barang), Ditjen Bea Cukai menunjukkan 2016 sebesar 1,3 juta ton, dan Januari-Mei 2017 impor beras 94 ribu ton.
- Stop Impor Jagung, tapi Impor Gandum meningkat. Kementan menghentikan impor jagung secara mendadak, akibatnya 483.185 ton jagung impor sempat tertahan di pelabuhan, serta berdampak pada peningkatan harga pakan ternak sekitar 20%.

3. Stabilisasi Harga Pangan yang Semu

- Harga pangan cenderung stabil, namun berada diatas harga acuan penjualan konsumen. Artinya upaya stabilisasi harga belum mampu memulihkan daya beli masyarakat.
- Berdasarkan hasil pemantauan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) terhadap 160 pasar di Indonesia selama periode 9 September 2016 s.d 12 Juni 2017 menunjukkan bahwa harga di pasar masih cenderung lebih tinggi dibandingkan harga acuan.
 - a. Harga beras medium lebih mahal 17 % dari harga acuan
 - b. Harga gula pasir lebih mahal 10,1 % dari harga acuan
 - c. Harga daging sapi kualitas 1 lebih mahal 47 % dari harga acuan
 - d. Harga daging sapi kualitas 2 lebih mahal 37 % dari harga acuan
 - e. Minyak Goreng curah lebih mahal 19 % dari harga acuan

4. Kesejahteraan Petani Menurun

- Upah buruh petani tergerus inflasi. Pada Mei 2017 inflasi mencapai 4,33%, sedangkan kenaikan upah nominal buruh hanya 4,16% (yoy). Kondisi serupa juga terjadi pada Mei 2016.
- NTP total menurun. Tahun 2017, Juni ==> 100,53 (Total), 2016, Juni ==> 101,47 (total)
- 2015, juni ==> 100,52 (total). Demikian juga NTP Pangan, 2017, Juni ==> 97,4, 2016, Juni ==> 98,74 (NTP Pangan), 2015, Juni ==> 97,29.

5. Ketimpangan dan Kepemilikan Lahan semakin Memburuk

- Ketimpangan lahan di Indonesia semakin memburuk. Gini Rasio lahan mencapai 0,64 pada tahun 2013, naik dari 0,54 pada tahun 1973. Akibatnya, berdasarkan sensus pertanian tahun 2013, sekitar 56,03 persen petani Indonesia merupakan petani gurem yang penguasaan lahannya kurang dari 0,5 hektar.
- Ketimpangan lahan berdampak pada rendahnya produktivitas dan kesejahteraan petani, serta usaha tani tidak memenuhi skala ekonomi. Idealnya luas lahan padi, jagung, dan kedelai, agar mampu memenuhi skala ekonominya minimal 1 hektar.
- Rata-rata luas lahan yang dikuasai oleh petani di Indonesia sangatlah kecil yaitu 0,8 hektar. Sementara Thailand 3,2 hektar, Filipina 2 hektar
- Sensus Pertanian 2013, rumah tangga usah pertanian paling banyak menguasai lahan dengan luas antara 0,20-0,49 Ha sebanyak 6,73 juta rumah tangga. Terjadi penurunan jumlah rumah tangga yang memiliki lahan antara 2003 dan 2013 sebesar 16,32%

6. Retorika Reforma Agraria

- Target pencetakan lahan sawah baru rata-rata pertahun 100.000 Ha, namun pencapaian kurang dari setengahnya.
- Program Reforma Agraria ternyata masih menjadi isapan jempol belaka. Ambisi Presiden Jokowi untuk melakukan redistribusi lahan seluas 9 juta Ha sama sekali belum menunjukkan hasil. Kebijakan Reforma Agraria justru disimpangkan menjadi sekedar sertifikasi tanah gratis. Padahal sertifikasi hakikatnya bukan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan struktur kepemilikan lahan, dan bahkan berpotensi memperparah ketimpangan lahan jikasertifikasi tidak tepat sasaran

7. Sektor Pertanian di tinggalkan Tenaga kerja Produktif

Tingkat kesejahteraan petani yang rendah, menjadikan sektor pertanian tidak menarik bagi para angkatan kerja muda. Padatahun 2012, penduduk yang bekerja di sektor pertanian 35,19 persen dari total tenaga kerja, 2016 porsinya tinggal 31,74 persen

8. Inkonsistensi Regulasi

- Dalam Permentan 139 Tahun 2014 importir daging hanya diperbolehkan melepas dagingnya untuk memenuhi kebutuhan industri. Namun, guna menekan harga daging Rp80.000 per kg, impor diminta melepas impornya ke pasar.
- Impor Daging Kerbau dari India. Padahal dalam PP Nomor 4 Tahun 2014 Pasal 6 ayat 1 memungkinkan pemerintah memasukkan produk hewan dari negara yang belum bebas penyakit mulut dan kuku (PMK) atau telah memiliki program pengendalian resmi PMK yang diakui badan kesehatan hewan dunia.

9. Persepsi Keliru terhadap Hasil Rating

- Rating (Food Sustainability Index/FSI) berdasarkan hasil survey terhadap anggota G 20 ditambah 5 negara kecil yang mewakili negara miskin, kaya dan maju. Artinya total sampel FSI hanya berjumlah 25 negara.
- Secara keseluruhan (overall) Indonesia berada di peringkat 21 dari 25 negara yang di survey dengan skor 50,77. Posisi Indonesia hanya lebih baik dari Uni Emirat Arab, Mesir, Arab Saudi, dan India. Aspek pertanian berkelanjutan (sustainable agriculture), Posisi Indonesia di rangking 16 (skor 53,87). Aspek kehilangan/susut pangan dan limbah (food loss and waste). Indonesia peringkat 24 (skor 32,53), terbawah kedua hanya lebih baik dari Arab Saudi. Aspek gizi (nutritional challenges). Indonesia masuk peringkat 18 (skor 56,79), lebih baik dari Turki, Rusia, Mesir, Meksiko, Afrika Selatan, Nigeria, dan India.
- Artinya dari hasil survey tersebut justru memprihatinkan, karena Indonesia kinerja keseluruhan food sustainability berada pada Rangking ke 21, kalah dengan Nigeria yg masuk rangking ke 19.
- Sementara index Global Food Security Index (GFSI), mengukur ketahanan pangan yang didasarkan atas Ketersediaan Pangan (food availability), Keterjangkauan Pangan (food affordability), Kualitas dan Keamanan Pangan (food quality and safety). GFSI mengambil sampel 113 negara dan FSI hanya 25 negara. Pada Juni 2016 peringkat GFSI Indonesia berada pada peringkat 71 dari 133 negara dengan skor 2,7.

10. Klaim Subyektif terkait Tingkat Kepuasan Petani

Survei INDEF terkait kepuasan petani tidak bisa dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kepuasan petani secara umum. Karena survei hanya dilakukan terhadap petani yang mendapat bantuan pemerintah. Dimana 76,8% petani puas atas program/bantuan Kementan, sisanya sebesar 23,2% responden menyatakan tidak

puas dan sangat tidak puas. Artinya, Petani yang mendapat bantuan saja tidak semuanya puas, apalagi petani yang tidak mendapatkan bantuan/tidak terdampak program. Dalam APBN 2016, pemerintah menetapkan target penerimaan perpajakan pada tahun 2016 sebesar Rp 1.546 triliun atau meningkat sebesar 3,9 persen dibandingkan APBN-P 2015. Meningkatnya target penerimaan perpajakan ditunjukkan untuk meningkatkan rasio pajak Indonesia hingga 13 persen. Peningkatan rasio pajak memang menjadi perhatian pemerintah saat ini mengingat rasio pajak Indonesia masih jauh di bawah Thailand (15%), Malaysia (15%), Filipina (13%), dan bahkan Vietnam (21%).

Sarwo Edhie (+62813 8047 7878)